

## **Pentingnya Ilmu Pendidikan Ekonomi Syari'ah Pada Distribusi Bantuan Sosial Di Masyarakat Bangka Tengah**

**Efendi Sugianto**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
[efendisugiin@gmail.com](mailto:efendisugiin@gmail.com)

### ***Abstrak***

Pendidikan ekonomi merupakan suatu penerapan ilmu ekonomi untuk menganalisis berbagai hal, terutama di bidang pendidikan sebagai barang ekonomi dan hubungannya dengan peningkatan sumber daya manusia sebagai modal dasar utama dalam pembangunan ekonomi di suatu negara. Masalah ekonomi yaitu masalah yang timbul saat keinginan dan kebutuhan bertemu dengan sumber daya yang terbatas dan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan belum bisa dipenuhi terutama masalah bantuan sosial yang ada di masyarakat pedesaan. Masalah yang ada di Bangka Tengah kerap terjadi dikarenakan adanya kesenjangan kesejahteraan sosial, kemudian kemiskinan yang terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung erat kaitannya dengan Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat yang belum optimal. Distribusi bantuan sosial yang ada di Bangka Tengah memberikan pelayanan mulai dari pelayanan sosial, pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan. Dengan ini perlunya sistem pelayanan yang akan diterapkan di wilayah Bangka Tengah menggunakan suatu Program yang dikenal dengan Program Silakso. Program Silakso merupakan sistem pelayanan terpadu yang dilengkapi dengan database masyarakat Bangka Tengah, semua data yang ada di dalam data Silakso bisa diakses oleh seluruh masyarakat desa, dengan program ini masyarakat juga bisa langsung melaporkan pengajuan bantuan dan cepat dilayani. Pemerintah Bangka Tengah telah membuat Aplikasi Silakso yaitu Sistem Layanan Kesejahteraan Sosial. Pada riset kali ini, penulis mencoba menganalisis Pentingnya Ilmu Pendidikan Ekonomi Syari'ah Mengenai Distribusi Bantuan Sosial Di Masyarakat Pedesaan. Ilmu ekonomi sendiri merupakan variable luluasa (x) yang terdiri dari pendidikan, sumber daya manusia serta pembangunan dan sebaliknya variabel terikat (dependent variable). Sendiri merupakan distribusi bantuan sosial (y). yang terdiri dari pelayanan sosial, pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan.

**Kata Kunci:** Ilmu Ekonomi, Distribusi, Pendidikan, Bantuan Sosial, Bangka Tengah

## **Abstract**

*Economic education is an application of economics to analyze various things, especially in the field of education as an economic good and its relationship with increasing human resources as the main basic capital in economic development in a country. Economic problems are problems that arise when wants and needs meet with limited resources and the availability of needed resources cannot be met, especially social assistance problems that exist in rural communities. Problems in Central Bangka often occur due to social welfare gaps, then poverty that occurs in the Regency / City of Bangka Belitung Islands Province is closely related to Education and Public Health which is not optimal. The distribution of social assistance in Central Bangka provides services ranging from social services, health services and education services. With this, the need for a service system to be implemented in the Central Bangka region uses a program known as the Silakso Program. The Silakso program is an integrated service system equipped with a database of the people of Central Bangka, all data in the Silakso data can be accessed by all village communities, with this program the community can also directly report applications for assistance and be quickly served. The Central Bangka Government has created the Silakso Application, namely the Social Welfare Service System. In this research, the author tries to analyze the importance of Sharia economic education regarding the distribution of social assistance in rural communities. Economics itself is a free variable (x) consisting of education, human resources and development and vice versa dependent variables. Itself is the distribution of social assistance (y). which consists of social services, health services and education services.*

**Keywords:** *Economics, Distribution, Education, Social Assistance, Central Bangka*

## **1. PENDAHULUAN**

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh karenanya pendidikan sangat perlu untuk dikembangkan dari berbagai ilmu pengetahuan, karena pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan kecerdasan suatu bangsa. Pendidikan merupakan bagian penting dari proses pembangunan nasional yang ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pendidikan merupakan salah satu alat untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu sistem pendidikan selalu mengalami perubahan agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya sementara tidak terus menerus dalam bentuk uang ataupun barang kepada masyarakat tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial harus diperhatikan sehingga tidak salah sasaran. Bantuan sosial ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada.

Pemerintah berperan penting dalam mengoptimalkan peningkatan sumber daya manusia atau modal manusia dengan menstimulus riset dan pemajuandalam meningkatkan produktivitas manusia yang merupakan teori pertumbuhan ekonomi baru. Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas dalam mewujudkan pertumbuhan serta pembangunan

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode dalam penulisan artikel ini yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan melalui pendekatan kualitatif *deskriptif-analitik*. Menurut Furchan dan Maimun pendekatan kualitatif deskriptif-analitik yaitu penelitian yang ditekankan pada penelusuran dan penelaahan sumber-sumber tertulis dan bahan bacaan lain yang ada kaitannya dengan tema yang dibahas untuk selanjutnya dikaji dan ditelaah secara mendalam.<sup>1</sup> Sedangkan Studi kepustakaan tidak hanya sekedar membaca dan mencatat literatur/buku tetapi membaca dan juga mengolah bahan penelitian. Studi pustaka ini juga mendeskripsikan objek dari suatu penelitian kemudian menganalisisnya. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah Analisis Konten (analisis isi). Analisis konten adalah penelitian yang bersifat mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di media massa.

Penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan yang di maksud adalah penelitian yang menggunakan data-data tertulis seperti buku, kitab, majalah, jurnal, surat kabar dan lain-lain. Karena untuk memperoleh data-data yang baik, maka harus digunakan teknik-teknik tertentu, diantaranya adalah *research* yakni pengumpulan bahan dengan membaca buku-buku, jurnal dan bentuk-bentuk bahan lain.<sup>2</sup> Pengumpululan data tersebut diantaranya terdiri dari sumber data primer dan skunder.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari buku-buku serta jurnal ekonomi berhubungan dengan penelitian ini yang dijadikan sebagai sumber utama, Sedangkan data skunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab serta data-data dari website atau media lainnya dengan membahas materi yang di teliti. sebagai data pendukung Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan meneliti sejumlah kepustakaan (*library research*), kemudian memilah-milahnya dengan memprioritaskan karya yang telah teruji kebenarannya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Furchan, Arif, and Agus Maimun, *Metode Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

<sup>2</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, 5 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), 24.

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet.12 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 206.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah secara umum sering dimaknai sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang berlandaskan nilai dan etika Islam yang mengharamkan riba dan lebih berlandaskan dengan kerja sama.<sup>4</sup>

Ada beberapa pengertian ekonomi Syariah diantaranya:

1. Menurut Yusuf Qardhawi ekonomi Syariah ialah ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan.
2. Menurut Chapra, ekonomi Syariah yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraan melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan Syariah.
3. Menurut M. Syauqi Al-Faujani, ekonomi Syariah yaitu segala aktivitas perekonomian berserta aturan-aturan yang didasarkan kepada pokok-pokok ajaran Islam tentang ekonomi.
4. Menurut Veithzal Rivai dan Andi Buchari bahwa ekonomi Syariah yaitu sebagai suatu ilmu interdisipliner, komprehensif dan saling terintegrasi yang mencakup ilmu Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis bahkan ilmu rasional. Dengan itu manusia dapat mengatasi keterbatasan sumber daya untuk mencapai kebahagiaan.
5. Menurut Monzer Kahf, ekonomi Syariah adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner (tidak dapat berdiri sendiri dan perlu penguasaan baik terhadap ilmu pendukungnya).
6. Menurut M.A Mannan, ekonomi Syariah merupakan ilmu yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai Islam.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Syariah ialah bentuk penerapan konsep nilai Islam dalam menjalankan kegiatan ekonomi baik itu secara langsung ataupun tidak.

Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pengertian diatas bahwa ekonomi Syariah ialah suatu ilmu dan praktik kegiatan ekonomi berdasarkan pada ajaran Islam yaitu ajaran yang tidak bertentangan dengan agama Islam dengan esensi tujuan ekonomi Islam sendiri adalah untuk mewujudkan kebahagiaan serta kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Ekonomi Syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang dalam aktivitasnya melarang kita untuk saling zolim menzolimi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dengan

---

<sup>4</sup> Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (December 16, 2019): 155–76, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.

memacu sektor riil dan menggunakan zakat infak sebagai distribusi pemerataan ekonomi.

Ekonomi Syariah telah diakui secara resmi oleh Bank Dunia dan menjadikan sebagai sebuah area prioritas dalam program sektor ekonomi kapitalisme yang telah lama mengakar. Ekonomi Syariah ini telah mendunia, ekonomi Syariah tidak hanya sebatas usaha keuangan Syariah. Tanda-tanda seharusnya di respons oleh pihak-pihak yang berwenang misalnya seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah dan sekolah untuk mengkaji kembali pelajaran ekonomi di sekolah.

## **B. Distribusi Dalam Ekonomi Islam**

Distribusi dalam ekonomi mempunyai makna yang lebih luas mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari keadilan distribusi bagi setiap individu. Namun pada realitanya, nampak terjadi ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan, sehingga berdampak pada peningkatan jumlah kemiskinan. Kebijakan distribusi dalam Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang didasarkan pada al-Qur'an, yakni agar kekayaan tidak beredar hanya pada satu kelompok saja.

## **C. Peranan pendidikan Syariah Sejak Dini**

Peran pendidikan ilmu ekonomi Syariah sejak dini ialah suatu pondasi untuk masa depan anak ketika sekolah dan tidak diharapkan mereka bisa menebarkan virus ekonomi Syariah ke keluarganya. Mempelajari sesuatu saat kita sudah dewasa tidak semudah di saat kita masih kecil. Karena otak orang dewasa sudah terisi berbagai masalah. Dan belajar ekonomi Syariah sejak dibangku sekolah mereka bisa mengembangkan kemandirian ekonomi Syariah di lingkungan mereka. Oleh karena itu taraf hidup masyarakat bisa terangkat.

Saat ini ekonomi yang dipelajari oleh siswa di sekolah lebih mengedepankan sistem ekonomi kapitalisme. Prinsip pelajaran ekonomi yang diajarkan di sekolah lebih mengedepankan paham persaingan, padahal prinsip persaingan bukanlah prinsip dalam kehidupan kemasyarakatan. Prinsip yang berkembang di Indonesia ialah gotong royong dan saling kerja sama sehingga menjadi bagian penting dalam ekonomi Syariah.

Dalam kurikulum ekonomi Syariah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) pembahasan yang dibahas diantara:<sup>5</sup>

1. Sejarah ekonomi Syariah
2. Keuangan makro dan mikro akad

---

<sup>5</sup> Didin Hafidhuddin Ma'turidi, *Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pembangunan Pertanian Di Indonesia* (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2016), 215.

3. Akad
4. Konsumsi
5. Fatwa.

Sedangkan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) biasanya diterapkan tentang seputar ilmu perbankan Syariah. Sumber daya yang berkualitas akan terbentuk dengan pembelajaran ekonomi Syariah di sekolah-sekolah bukan hanya di perguruan tinggi saja.

Dan adapun filosofi utama ekonomi Syariah, yaitu mengedepankan kemitraan dan kebersamaan dalam keuntungan dan risiko yang lebih adil.<sup>6</sup> Prinsip seperti inilah yang akan dikembangkan oleh sistem pendidikan kita, bukan hanya mencetak peserta didik yang individualisme dan ingin memenangkan persaingan demi keuntungan pribadi

Ragam macam usaha yang dikembangkan oleh pelaku Syariah harus berdasarkan ketentuan Syariah, diantaranya:

1. Barang yang diperdagangkan harus halal
2. Jujur dalam timbangan dan alat ukur
3. Murah serta harus menjaga kebersihan.<sup>7</sup>

Ragam bisnis berbasis ekonomi Syariah yang bertambah luas. Bukan hanyabidang perbankan saja, akan tetapi juga memasuki wilayah asuransi, pasar modal, sahani pegadaian, dan sebagainya. Aspek perlindungan hukum menjadi penting diupayakan dalam perekonomian Syariah. Dalam hal ini implementasi, para pelaku dan pengguna ekonomi Syariah harus menjalankan kegiatan berdasarkan Syariah.<sup>8</sup>

Penyampaian materi ekonomi-akuntansi syariah bagi siswa SMA sederajat menjadi bagian dari proses membangun karakter siswa untuk bermuamalah secara syariah, sesuai dengan nilai-nilai yang disampaikan Al-quran dan hadis. Hal ini menjadi syiar penting agar kelak bila siswa menjadi pelaku bisnis dalam bidang apapun diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai Islam dalam aktivitas bisnisnya. Pengembangan kurikulum sebaiknya menggunakan beberapa landasan diantaranya adalah landasan sosial budaya dan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia .

Landasan sosial budaya dan agama merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari sosiologi dan antropologi yang dijadikan titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Karakteristik sosial budaya dan agama dimana

---

<sup>6</sup> Syaugi Mubarak Seff, "Ekonomi Syari'ah Sebagai Landasan Dalam Al-Bai' (Jual Beli)," May 2017.

<sup>7</sup> Inggang Perwangsa Nuralam, *Etika Pemasar Dan Kepuasan Konsumen Dalam Pemasaran Perbankan Syariah* (Malang: Universitas Brawijaya Press, n.d.).

<sup>8</sup> Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 136.

peserta didik hidup berimplikasi pada program pendidikan yang akan dikembangkan. Kebudayaan bukan hanya berupa material belaka, melainkan juga berupa sikap mental, cara berpikir dan kebiasaan hidup.

#### ***D. Solusi Untuk Memperbaiki Masalah Ekonomi Di Bangka Tengah***

Perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia terutama di Bangka Tengah belum terlalu signifikan. Ada beberapa sebab diantaranya:

1. Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan Syariah.
2. Peran Indonesia yang lebih banyak menjadi konsumen dibandingkan dengan produsen.
3. Memburuknya posisi Indonesia di industri halal global
4. Zakat, sedekah dan waqaf masih rendah untuk mendukung pembangunan.
5. Rendahnya kapasitas perbankan Syariah.<sup>9</sup>

Perekonomian Islam dapat kita lihat dari kemunculan bank syariah di berbagai negara. Perekonomian Islam dimulai dengan kehadiran perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan etika, dengan dasar al Qur'an dan Hadis. Perekonomian berbasis Hukum Islam pada hakikatnya telah diperkenalkan sejak Zaman Rasulullah dan para sahabat. Dilarangnya pengenaan riba, maisir, gharar, dzolim dan haram menjadi syarat-syarat yang mendasar pelaksanaan ekonomi Islam

Hal ini dikarenakan ekonomi berbasis Hukum Islam sudah menjadi kewajiban bagi umat muslim dimanapun berada untuk mempelajari, memahami dan menerapkannya. Hukum dari pengamalan ekonomi berbasis Hukum Islam adalah wajib bagi umat muslim sebagai bentuk ketaatan manusia secara kaffah kepada Allah SWT. Berdasarkan dasar itulah kemudian perekonomian Islam hadir ditengah masyarakat. Meski dalam perkembangannya tidak sepopuler ekonomi konvensional, perekonomian berbasis Hukum Islam memiliki banyak peminat.

Upaya untuk mengatasi masalah ekonomi diantaranya:

1. Pemenuhan berbagai faktor pendukung untuk pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja khususnya penyerapan tenaga kerja khususnya percepatan pembangunan infrastruktur baik itu fisik atau lunak.
2. Pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial yang berdaya saing tinggi dengan mengoptimalkan dengan memanfaatkan teknologi,

---

<sup>9</sup> Mhd. Asaad, "PENINGKATAN PERANAN PERBANKAN SYARIAH UNTUK PEMBIAYAAN USAHA PERTANIAN," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 35, no. 1 (June 2, 2011), <https://doi.org/10.30821/miqot.v35i1.134>.

informasi digital dan sebagainya.

Percampuran kebijakan tersebut juga disertai dukungan partisipasi swasta secara aktif yang diyakini bisa mengatasi berbagai masalah ekonomidi Indonesia seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial- ekonomi. Dan adapun peningkatan peran masalah dari pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur di daerah termasuk di desa juga diperlukan. Hal ini dilakukan melalui beberapa *item*, diantaranya:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan desa, kabupaten ataupun kota.
2. Optimaliasi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan sarana desa.
3. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Untuk memperbaiki masalah yang ada yaitu peran masyarakat dapat berperan sebagai pelaku produksi, sedangkan swasta hanya berlaku sebagai *off taker*, rantai pemasaran serta rantai input produksi. Dan juga perlu menggunakan program Prukades sebenarnya bukan hanya bertujuan untuk memberdayakan orang mi

skin, akan tetapi untuk meningkatkan daya saing dengan menyatukan beberapa desa melalui satu produk unggulan.

Prukades itu ada yang sudah tercipta dari dulu bahkan sangat natural. Akan tetapi juga daerah yang mereka punya lahan tapi belum tahu mau di bikin buat apa. Dengan menggunakan forum bisnis, perusahaan-perusahaan yang bisa dilihat mereka itu membutuhkan apa sehingga ada bisnis yang jelas.

#### ***E. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah***

Peran pendidikan dan pengajaran ekonomi Islam serta praktik bisnis berdasarkan prinsip syariah tidak lagi merupakan keniscayaan, melainkan sudah menjadi kenyataan dan semakin banyak. Lembaga ekonomi dan produk- produk bisnis Islami bermunculan dan tumbuh di berbagai belahan bumi, bahkan di tengah masyarakat non-muslim. Kerja sama merupakan penggerak utama dalam ekonomi syariah. Ekonomi syariah menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Melarang segala bentuk riba. Ekonomi syariah menolak suatu akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang.

Sebagai sebuah ilmu, ekonomi syariah memiliki prinsip-prinsip dasar yang melandasi keilmuannya. Dalam buku Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional, dijelaskan beberapa prinsip ekonomi Islam, yaitu:

1. Sumber daya dipandang sebagai amanah yang diberikan Allah kepada



manusia, sehingga pemanfaatannya harus bisa dipertanggungjawabkan di akhirat. Artinya, manusia harus menggunakan sumber daya untuk kegiatan yang bermanfaat, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.<sup>10</sup>

2. Kepemilikan pribadi tetap diakui. Namun, dalam batas-batas tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh secara tidak sah.
3. Bekerja merupakan penggerak utama kegiatan ekonomi syariah. Islam menganjurkan manusia untuk bekerja dan berjuang untuk mendapatkan materi dengan berbagai cara, asalkan tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Islam.
4. Kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang. Setiap orang harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya disalurkan untuk kepentingan orang banyak.
6. Islam menjamin kebebasan individu. Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.
7. Seorang muslim harus tunduk pada Allah SWT. Dengan begitu akan mendorong seorang muslim menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan keburukan.
8. Zakat wajib dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab). Zakat adalah alat distribusi sebagian kekayaan orang yang ditujukan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan.
9. Islam melarang berbagai macam bentuk riba.
10. Islam memperkenankan negara untuk mengatur masalah perekonomian.

Secara umum prinsip ekonomi Islam terbagi menjadi tiga bagian. Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yang meliputi tauhid (keimanan), 'adl (*keadilan*), nubuwah (*kenabian*), khilafah (*pemerintah*) dan ma'ad (*hasil*). Dari kelima nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yaitu kepemilikan multi jenis (*multiple ownership*), kebebasan bertindak atau berusaha (*freedom to act*) serta keadilan sosial (*social justice*).<sup>11</sup>

Lima nilai universal memiliki fungsi seperti pondasi, yaitu menentukan kuat tidaknya suatu bangunan. Tauhid (*keesaan Allah*), memiliki arti bahwa

---

<sup>10</sup> Hamdi Agustin, *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*, Cetakan Ke-1 (Depok: Rajawali Pers, 2017).

<sup>11</sup> Misbahul Khoir and Yusri Naili, "ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN PABRIK TAHU DI POLUJU BAURENO BOJONEGORO DITINJAU DARI PRINSIP TANGGUNG JAWAB DALAM EKONOMI ISLAM," *Akademika* 12, no. 02 (December 3, 2018), <https://doi.org/10.30736/adk.v12i02.181>.

semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat kelak. 'Adl (*keadilan*), memiliki arti bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan tidak menzalimi pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi. *Nubuwwah* (kenabian), menjadikan sifat dan sikap nabi sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas di dunia. *Khilafah* (pemerintahan), peran pemerintah adalah memastikan tidak ada distorsi sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. *Ma'ad* (hasil), dalam Islam hasil (laba) yang diperoleh di dunia juga menjadi laba di akhirat.

Prinsip ekonomi syariah secara garis besar mengajarkan bahwa harta bukanlah satu-satunya tujuan kehidupan di dunia, namun harta hanyalah fasilitas atau sarana untuk beribadah kepada Allah SWT. Banyak lagi prinsip dasar dalam ekonomi syariah yang lain.

Jika ditelaah lagi secara rinci memiliki beberapa poin tegas dan berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang sudah berkembang di dunia. Ekonomi Islam menjunjung tinggi ketauhidan dan ketakwaan terhadap Allah SWT. Meski demikian, ekonomi Islam tak hanya menambah manfaat kepada muslim saja, tapi bisa diaplikasikan oleh semua kalangan orang.

Adapun prinsip dasar ekonomi syariah secara rinci yang dirangkum dari berbagai sumber diantaranya<sup>12</sup>:

a. Keimanan

Dalam kegiatan perekonomian, baik individu maupun kelompok, harus memegang erat prinsip ini agar perjalanan ekonomi sesuai dengan yang telah diajarkan dalam Islam. Jadi segala aktivitas ekonomi syariah harus mengacu pada ketauhidan, keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT.

b. Memberikan Manfaat

Di dalam ekonomi konvensional yang menjadi prinsip adalah menggunakan sumber daya seminimal mungkin dan menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin. Namun, di ekonomi yang berlandaskan syariat Islam ada tujuan yang lebih dari itu, yakni ada kemaslahatan dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat yang lebih luas lagi. Kegiatan ekonomi syariah diharapkan mampu meningkatkan taraf kehidupannya lebih tinggi lagi.

c. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan ekonomi Islam setiap individunya harus memperhatikan segala aspek agar tidak menyeleweng dari nilai-nilai

---

<sup>12</sup> A.Z. Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah* (Bandung: CV. Alfabeta, 2010).

syariah. Segala bentuk kecurangan atau penipuan dan perbuatan negatif lainnya merupakan hal yang dilarang dalam ekonomi syariah.

d. Harta

Konsep yang diterapkan adalah harta dalam bentuk apapun berapa pun jumlahnya hakikatnya semua itu hanya milik Allah semata dan manusia hanya mendapat amanah dari Allah SWT.

e. Adil

Keadilan sangat ditekankan dan telah menjadi kewajiban di setiap aktivitasnya. Keadilan disini diartikan sebagai perilaku di mana menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dimana prinsip ekonomi harus menerapkan dan melayani semua masyarakat tanpa memandang status sosial. Keadilan dalam ekonomi syariah bertujuan agar semua masyarakat dari semua golongan merasakan kenyamanan dan kesamaan.

f. Persaudaraan

Persaudaraan merupakan salah satu tujuan atau misi adanya ekonomi syariah. Sangat dianjurkan untuk bekerja sama atau selalu berjamaah dalam melakukan apapun, jangan sampai ada yang ingin sukses sendiri, ingin kaya sendiri. Dengan hal ini maka sistem ekonomi Islam menekankan pada sosial bukan individual, karena pada dasarnya manusia hidup di dunia ini dengan tujuan bermanfaat bagi manusia dan saling menjaga tali silaturahmi.

g. Etika

Etika harus menjadi salah satu dasar pelaksanaan ekonomi Islam atau syariah, etika yang sesuai dengan ajaran Islam sangat diperlukan dalam segala aktivitas atau kegiatan ekonomi yang sesuai ajaran Islam. Perlu kita ketahui, kegiatan ekonomi merupakan salah satu jenis ibadah di bidang muamalah. Maka dari itu setiap kegiatan ekonomi syariah harus dilandasi dengan etika-etika atau norma yang baik sesuai dengan ajaran Islam.<sup>13</sup>

h. Melibatkan Pemerintah

Dalam melaksanakan kegiatan perekonomian Islam harus melibatkan pemerintah di dalamnya, selain itu ekonomi Islam atau syariah harus mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah selama itu tidak menyeleweng dengan ajaran atau nilai-nilai Islam. Karena bagaimanapun yang memiliki kuasa atau hak lebih untuk mengatur jalannya perekonomian adalah pemerintah, baik buruknya perkembangan suatu negara disebabkan oleh pemerintahannya. Jadi bagaimana pun ekonomi

---

<sup>13</sup> Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014).

syariah harus selalu melibatkan pemerintah dalam perjalanan ekonominya.

i. Bebas dan Tanggung Jawab

Menurut perspektif ushul fiqh kebebasan diartikan sebagai suatu kebebasan yang harus dibarengi dengan suatu pertanggungjawaban. Sedangkan untuk tanggung jawab itu tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat kelak. Inilah prinsip ekonomi Islam, manusia diberi kebebasan namun ada batasannya yakni harus dipertanggungjawabkan. Apapun yang terjadi dan sudah dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan.

j. Kerjasama

Dalam ekonomi syariah kerjasama merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan seperti layaknya sholat yang dilakukan secara berjamaah bisa mendapatkan pahala lebih yakni 27 derajat. Begitu juga dalam perekonomian ketika apapun dilakukan bersama-sama, maka nilai ibadah maupun nilai dalam hal harta akan semakin bertambah. Jadi dalam ekonomi syariah semua kegiatan dan aktivitas dilakukan secara berjamaah dengan niatan yang baik agar bisa menghasilkan output yang baik pula.

Dan ada juga prinsip tersendiri yang didasari oleh ajaran agama Islam diantaranya:

- 1) Ada beberapa sumber daya yang dipandang sebagai titipan dari Allah SWT kepada umatnya
- 2) Kerja sama sebagai penggerak utama dalam ekonomi Syariah
- 3) Melarang riba
- 4) Menolak suatu akumulasi kekayaan yang dikuasai beberapa orang
- 5) Kekayaan yang sudah memenuhi nisab maka wajib bayar zakat.

#### **4. KESIMPULAN**

Perekonomian Islam merupakan sistem ekonomi dengan dasar hukum yang digunakan yaitu hukum Islam. Perekonomian Islam mesti menggunakan dasar hukum Islam akan tetapi hal ini tidak menghalangi masyarakat yang tidak beragama Islam untuk turut andil dalam sistem perekonomian Islam. Pada dasarnya ekonomi Islam memiliki tujuan untuk memakmurkan, tidak hanya mencari keuntungan, sehingga banyak negara yang tidak bermayoritas masyarakatnya beragama Islam ataupun bahkan negara liberal ikut menerapkan ekonomi Islam diberbagai sisi. Ekonomi Islam yang diterapkan di berbagai negara ini yang menjadi primadonanya adalah perbankan Islam atau di Indonesia di sebut Perbankan Syariah. Perkembangan praktik ekonomi Islam dalam berbagai aspeknya yang begitu pesat maka sangat perlunya mempersiapkan generasi muda ekonomi Islam yang dapat menjaga dan meneruskan eksistensi ekonomi Islam.

Konsep distribusi pada sistem ekonomi Islam belum sepenuhnya terapkan dalam sistem ekonomi di Indonesia saat ini. Hanya sebagian kecil dari konsep distribusi yang telah terapkan, diantaranya adalah dengan berdirinya Badan Amil Zakat, serta wakaf dan secara hukum diaplikasikannya hukum waris Islam. Namun aplikasi konsep distribusi tersebut belum mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi ekonomi Indonesia.

Dalam menjalankan konsep distribusi ekonomi Islam di Indonesia maka diperlukan sebuah perangkat institusi distribusi dan instrument distribusi. Institusi distribusi berkenaan masalah peran pemerintah dalam proses distribusi dan peran masyarakat dalam proses distribusi. Sedangkan instrument distribusi menyangkut masalah optimalisasi zakat, wakaf, waris dan infak/sedekah sebagai instrumen distribusi di Indonesia.

Peran pemerintah dalam proses distribusi sangatlah diperlukan agar mekanisme pasar berjalan dengan baik. Disamping pemerintah memiliki tugas sebagai regulator yang mengeluarkan peraturan/undang-undang tentang persaingan usaha dan tidak kalah pentingnya adalah pemerintah juga dituntut untuk mendorong lahirnya sikap moral yang tinggi baik untuk pemerintah sendiri maupun pelaku ekonomi lainnya. Pemerintah juga berperan sebagai penjamin terciptanya distribusi yang adil di tengah-tengah masyarakat agar distribusi pendapatan berdampak pada penurunan jumlah kemiskinan saat ini.

Disamping pemerintah, masyarakat pun berkewajiban untuk mewujudkan keadilan distribusi. Masyarakat harus memutuskan secara adil siapa yang berhak mendapatkan barang dan jasa, serta dengan cara bagaimana setiap masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan kemaslahatan, sehingga setiap individu dapat merasakan kesejahteraan. Kesadaran akan pentingnya kemaslahatan akan mendorong setiap individu untuk berperilaku ekonomi yang sesuai dengan ajaran syar'i dan berusaha mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai falah.

## **5. REFERENSI**

- Agustin, Hamdi. Studi Kelayakan Bisnis Syariah. Cetakan Ke-1. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Asaad, Mhd. "PENINGKATAN PERANAN PERBANKAN SYARIAH UNTUK PEMBIAYAAN USAHA PERTANIAN." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 35, no. 1 (June 2, 2011). <https://doi.org/10.30821/miqot.v35i1.134>.
- Aziz, A.Z. Abdul. Manajemen Investasi Syariah. Bandung: CV. Alfabeta, 2010.
- Hafidhuddin Ma'turidi, Didin. Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pembangunan Pertanian Di Indonesia. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2016.
- Jauhari, Iman. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Khoir, Misbahul, and Yusri Naili. "ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN PABRIK TAHU DI POLUJU BAURENO BOJONEGORO DITINJAU DARI PRINSIP TANGGUNG JAWAB DALAM EKONOMI ISLAM." *Akademika* 12, no. 02 (December 3, 2018). <https://doi.org/10.30736/adk.v12i02.181>.
- Mubarak Seff, Syaugi. "Ekonomi Syari'ah Sebagai Landasan Dalam Al-Bai'(Jual Beli)," May 2017.
- Perwangsa Nuralam, Inggang. Etika Pemasar Dan Kepuasan Konsumen Dalam Pemasaran Perbankan Syariah. Malang: Universitas Brawijaya Press, n.d.
- Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (December 16, 2019): 155–76. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.
- Yunia Fauzia, Ika. Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah. Jakarta: Kencana, 2014.